



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CHRISNO RAMPALODJI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHH : 1513

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.153.629.000

1. Tanah Seluas 1046 m2 di LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 28.242.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/230 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.190.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/71 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 348.496.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/118 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 371.968.000
5. Tanah Seluas 2500 m2 di LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 17.875.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/189 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
7. Tanah Seluas 10450 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 52.250.000
8. Tanah Seluas 9888 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 34.608.000
9. Bangunan Seluas 10010 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 379.600.000

1. LAINNYA, UNITED SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 500.000



2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI		
Rp. 110.100.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI		
Rp. 9.000.000		
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI		
Rp. 10.000.000		
5. MOBIL, HONDA/HRV SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI		
Rp. 250.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>84.317.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>970.329.050</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.587.875.050</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.587.875.050</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.